



Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti Bicara Ibu Madrasah Pertama bagi Anak-Anak

Bangun Usaha Keluarga Harus Panjang Akal, Bukan Andalkan Modal

Membangun ketahanan keluarga menjadi salah satu atensi Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti. Dia menilai ketahanan keluarga menjadi pondasi bagi ketahanan masyarakat. Selanjutnya ketahanan masyarakat berdampak bagi kekuatan ketahanan negara.



BAMBANG ANJAR JALUMURTI

"KETAHANAN keluarga menjadi sesuatu yang krusial. Tidak bisa disepelekan," ingat Bambang saat bertemu dengan ibu-ibu di Keman-tren Danurejan dan Gondokuman Kota Jogja baru-baru ini.

Bambang turun ke bawah sebagai narasumber kegiatan peningkatan kapasitas keluarga. Pesertanya mayoritas ibu-ibu rumah tangga yang tersebar di sejumlah kelurahan di kedua kementren tersebut.

Menurut dia, keluarga menjadi komponen penting. Peningkatan kesejahteraan keluarga juga menjadi perhatian pemerintah.

Baca Bangun... Hal 7

KELUARGA MENUJU SEJAHTERA

- 2022 jumlah KMS se-Kota Jogja ada sejumlah 15.810 kepala keluarga (KK).
- 2023 jumlahnya naik menjadi 17.451 KK.
- Bagi keluarga yang KMS-nya dicabut diharapkan masih bisa mengakses bantuan dalam bentuk lain.
- Di antaranya, jaminan pendidikan daerah (JPD).
- Sebab, sebagian besar masalah yang diadukan warga terkait pencabutan KMS itu berhubungan dengan intervensi pemerintah daerah terhadap bantuan pendidikan sekolah anak.



KOMUNIKATIF: Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti berdialog dengan ibu-ibu di Kementren Gondokuman. Temanya soal pembangunan ketahanan ekonomi keluarga.

Bangun Usaha Keluarga Harus Panjang Akal, Bukan Andalkan Modal

Sambungan dari hal 1

Bagi Bambang, pentingnya peran keluarga tak dapat dilepaskan dari sosok ibu. Sebab, ibu menjadi tempat pendidikan perdana bagi anak-anak. "Ingat ibu itu merupakan madrasah pertama bagi putra-putrinya," tandas Bambang.

Saat berdiskusi, wakil rakyat tiga periode ini menyinggung peran perempuan dan ibu-ibu ikut membangun kekuatan ekonomi keluarga. Kemandirian ekonomi sangat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Kemandirian itu bisa diawali dengan menciptakan usaha. Dalam mengembangkan usaha, Bambang menilai faktor terpenting bukan soal modal. "Justru yang paling utama harus panjang akal," katanya pria asal Triharjo, Sleman ini.

Dia lantas memberikan ilustrasi kelompok ibu-ibu di daerah Baci, Gondokuman yang memproduksi jus dari buah-buahan. Salah satu anggota kelompok itu datang ke Pasar Buah Giwang. Di sana bertemu pedagang dan membeli buah-buahan yang secara fisik kurang baik ta-

pi masih sehat dan layak konsumsi. Buah itu kemudian diolah menjadi aneka jus. "Buah itu dibeli dengan harga relatif murah.

Diolah menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Diedarkan laku di pasaran," ceritanya. Kini kelompok usaha jus buah itu terus berkembang. Mayoritas pengelolanya ibu-ibu rumah tangga. "Kemandirian ekonomi keluarga tercipta dari usaha bersama itu," lanjut Bambang.

Di bagian lain, Bambang juga bercerita soal keluarga menuju sejahtera (KMS). Tahun lalu jumlah KMS se-Kota Jogja ada sejumlah 15.810 kepala keluarga (KK). Tahun ini jumlahnya naik menjadi 17.451 KK. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai protes karena KMS dicabut. Bambang kemudian mengadakan sampling terhadap KMS yang dicabut. Hasilnya ada yang kurang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan warga.

Misalnya saat uji data, salah seorang warga yang dicabut KMS-nya lantaran dianggap sudah mandiri. Setelah dicek secara mendetail warga yang dicabut keanggotaan KMS-nya itu merupakan keluarga dengan tiga orang anak. Semuanya sekolah dengan

penghasilan kedua orang tuanya Rp 1,8 juta per bulan. Rumah tinggal memang milik sendiri berupa semi permanen. Daya listrik rumah 900 VA dan punya kulkas. Setiap individu di dalam rumah sudah memiliki smartphone.

"Dari kriteria tersebut mereka dianggap sudah keluarga mandiri dan tidak perlu lagi mendapat intervensi KMS," terangnya. Padahal, sambung Bambang, setiap rumah tangga sekarang sudah 900 VA daya listriknya. Soal telepon cerdas dibutuhkan untuk kegiatan sekolah. Peralatan elektronik dianggap sebagai barang tersier.

"Kulkas dimanfaatkan unit produksi buat jualan es dan lain sebagainya. Indikator ini yang sebenarnya tidak tepat," ujarnya.

Bagi keluarga yang KMS-nya dicabut diharapkan masih bisa mengakses bantuan dalam bentuk lain. Di antaranya, jaminan pendidikan daerah (JPD). Sebab, sebagian besar masalah yang diadukan warga terkait pencabutan KMS itu berhubungan dengan intervensi pemerintah daerah terhadap bantuan pendidikan sekolah anak. (kus/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005